



LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA  
NOMOR 7 TAHUN 2000

---

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA

Nomor 2 Tahun 2000

TENTANG

SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KOTA SALATIGA TAHUN ANGGARAN 1999 / 2000

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA

Menimbang : bahwa Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 1999 / 2000 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat ;
  2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 ) ;
  3. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 ) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5 ) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6 ) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh - contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk / Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistim Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1999 tentang Bentuk dan Susunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
14. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 1999 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 1999 / 2000 ;
15. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 1999 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 1999 / 2000.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN ANGGARAN 1999 / 2000.**

**Pasal 1**

Jumlah Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Tahun Anggaran 1999 / 2000 sebesar Rp. 4.226.213.896,00 terdiri atas :

**a. PENDAPATAN:**

- Pendapatan Rp. 33.203.722.770,00

**b. BELANJA:**

1. Rutin Rp. 23.402.980.543,00

2. Pembangunan Rp. 5.574.528.331,00

-----  
Rp. 28.977.508.874,00  
-----

Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berlebih

Rp. 4.226.213.896,00  
=====

**Pasal 2**

Jumlah Pendapatan dan Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1999 / 2000 sebesar Rp. - terdiri atas :

a. Pendapatan	Rp.	3.120.386.106,00
b. Belanja	Rp.	3.120.386.106,00
		-----

Sisa Urusan Kas dan Perhitungan berlebih/berkurang	Rp.	-
		=====

**Pasal 3**

- (1). Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2, menurut C I/A sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (2). Bentuk dan susunan Perhitungan Kas dan pencocokan antara Sisa Kas dan Sisa Perhitungan APBD, menurut C. II sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.
- (3). Rincian dari Ringkasan Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) adalah :
  - a. Lampiran Peraturan Daerah ( C-I ) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini ;
  - b. Perhitungan Pendapatan ( C/I ) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini ;

- c. Ringkasan Perhitungan Pendapatan ( Lampiran ( C/I ) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini ;
  - d. Perhitungan Belanja Rutin ( Lampiran C/I/R ) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini ;
  - e. Ringkasan Perhitungan Belanja Rutin ( Lampiran C/I/R ) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini ;
  - f. Perhitungan Belanja Pembangunan ( Lampiran C/I/P ) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini ;
  - g. Ringkasan Perhitungan Belanja Pembangunan ( Lampiran C/I/P ) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini.
- (4). Rincian Urusan Kas dan Perhitungan ( UKP ) dimaksud Pasal 1 yaitu :
- a. UKP Penerimaan menurut C/IP/UKP sebagaimana Lampiran X Peraturan Daerah ini ;
  - b. UKP Belanja menurut C/IB/UKP sebagaimana Lampiran XI Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 4

Lampiran - lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Salatiga.  
pada tanggal : 19 Agustus 2000

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SALATIGA  
KETUA  
cap.ttd

WALIKOTA SALATIGA  
  
cap.ttd

SRI UTAMI DJATMIKO

S U W A R S O

Disyahkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat  
Daerah Nomor 170/466/2000 tanggal 19 Agustus 2000  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

cap. ttd

SRI UTAMI DJATMIKO

Diundangkan di Salatiga  
pada tanggal 21 Agustus 2000

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA

cap. ttd

SOEDARMADJI

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2000 NOMOR 3

## PERIODE ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN : 1999/2000

URAIAN	JUMLAH		NO.	URAIAN		JUMLAH	
	ANGGARAN	REALISASI		ANGGARAN	REALISASI	6	7
SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN ASLI DAERAH SENDIRI	4.336.799,000	4.336.799,658	1	BELANJA RUTIN	17.886.744,000	16.877.168,674	
- Pajak Daerah	5.337.345,000	5.750.715,793		1. Belanja Pegawai	3.717.197,000	3.423.699,439	
- Retribusi Daerah	1.161,000	1.318,081,979		2. Belanja Pemeliharaan	648.136,000	595.889,740	
- Bagian Laba Usaha Daerah	3.448,145,000	3.468.307,328		3. Belanja Perjalanan Dinas	92.046,000	71.654,100	
- Lain-lain Pendapatan	187,509,000	186.325,403		4. Belanja lain-lain	1.896.851,000	1.654.096,990	
- PEMBERIAN YANG BERASAL DARI PEMERINTAH PUSAT ATAU INSTANSI LAINNYA	538,322,000	776,001,663		5. Anggaran Pinjaman/hutang dan bunga	115,000,000	103.800,000	
- Bagi Hasil Pajak	22.088,765,000	23.116,207,319	11	6. Penunjan dan onderstand	3.500,000	550,000	
- Bagi Hasil bukan Pajak	1.901,113,000	3.867,435,705		7. Guprasubsidi/Sumbangan kpd Daerah Bawahan	105.897,000	105.184,700	
- Dana Rutin Daerah	22,000,000	41.412,010		8. Pengeluaran tak termasuk Bag hin	399.387,000	395.346,000	
- Bantuan Pembangunan *	17.245,676,000	16.859,040,894		9. Pengeluaran tak Tersangka	976.915,000	175.590,900	
- Pencataman Lainnya	2.192,523,000	2.306,267,000		JUMLAH	75.841.473,000	73.402.980,343	
PEMBANGUNAN	98,233,000	106,001,710	11	BELANJA PEMBANGUNAN	33,000,000	32,960,000	
- Pinjaman Pemerintah Daerah	0	0		1. Sektor Industri	250.810,000	250.311,000	
	0	0		2. Sektor Pertanian dan Kehutanan	-	-	
	0	0		3. Sektor Sumber Daya Air dan Irigasi	-	-	
	0	0		4. Sektor Tenaga Kerja	-	-	
	0	0		5. Sektor Perdagangan, Pengembangan Usaha Daerah dan Kemangan Daerah dan Koperasi *	258.396,000	239.482,600	
	0	0		6. Sektor Perambangan dan Energi	2.101,267,000	1.843.849,216	
	0	0		7. Sektor Pariwisata dan Telekomunikasi	105,000,000	102.843,175	
	0	0		8. Sektor Pemb. Daerah dan Pemukiman	102.275,000	102.242,310	
	0	0		9. Sektor Lingh. Hidup & Tata Ruang	552.317,000	488.316,345	
	0	0		10. Sektor Pendidikan, Kebudayaan, Nias, Kepercayaan tbd. Tuhan YME, Pemuda dan Olah Raga *	186.337,000	175.704,715	
	0	0		11. Sektor Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Peranan Wanita, Anak dan Remaja	148.548,000	148.284,820	
	0	0		12. Sektor Perumahan dan Pemukiman	22.050,000	22.050,000	
	0	0		13. Sektor Perumahan dan Pemukiman	49.591,000	48.047,750	
	0	0		14. Sektor Agama	38,000,000	33.591,450	
	0	0		15. Sektor Ilmu Penget dan Teknologi	60,000,000	60,000,000	
	0	0		16. Sektor Hutan	140,000,000	124.650,000	
	0	0		17. Sektor aparat. Pemerintah dan Pegawai	80,000,000	67,006,200	
	0	0		18. Sektor Politik, Pen. Komunitas & Media Massa	1.513.415,000	1.410.579,200	
	0	0		19. Sektor Kesam. dan Keterliban Umum	183.644,000	175.924,550	
	0	0		20. Jumlah II	210,000,000	209.685,000	
Jumlah	31.762,909,000	33.203,722,770		Jumlah Anggaran Pembangunan *	6.035,150,000	5.574.528,331	
Urutan Kas dan Debitur	2.844.597,000	3.120.386,106		Jumlah Bel. Rutin + Pembangunan	5.921.436,000	5.921.436,000	
				Urutan Kas dan Debitur	31.762,909,000	28.977.508,874	
					2.844.597,000	3.120.386,106	

\*) Selselh Anggaran Pembangunan sebesar Rp. 113.714.000,- (sudah dianggarkan, tidak dijumlahkan dalam APBD/DADPK TGL 13 JANUARI 2000

RINGKASAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN  
TAHUN ANGGARAN 1999/2000

LAMPIRAN C/1

KODE ANGGARAN	URAIAN BAGIAN DAN POS	ANGGARAN SETELAH PERUB	JUMLAH DITERIMA	BERLEBIH/BERKURANG
		3	4	5
1.1	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN YLL	4,336,799,000	4,336,799,658	658
1.2	BAGIAN PENDAPATAN ASU DAERAH	5,337,345,000	5,750,715,793	413,370,793
1.3	PENDAPATAN YANG BERASAL DARI PEMBERIAN PEMERINTAH DAN ATAU INSTANSI YANG LEBIH TINGGI	22,088,765,000	23,118,207,319	1,027,442,319
1.4	BAGIAN PINJAMAN PEMERINTAH DAERAH	0	0	0
	<b>JUMLAH</b>	<b>31,762,909,000</b>	<b>33,203,722,770</b>	<b>1,440,813,770</b>

RINGKASAN BELANJA RUTIN PER BELANJA

KODE ANGGARAN	URAIAN BAGIAN DAN POS	ANGGARAN SETELAH PERUB	JUMLAH REALISASI	BERLEBIH/ BERKURANG
1	2	3	4	5
	BELANJA DPRD	364.470,000	358.295,000	(6.175,000)
	BELANJA WALIKOTA	274.500,000	267.237,280	(7.262,720)
	BELANJA PEGAWAI	17.247,774,000	16.251.636,394	(996.137,606)
	BELANJA BARANG	3.717,197,000	3.423.699,439	(293.497,561)
	BELANJA PEMELIHARAAN	648.136,000	595.889,740	(52.246,260)
	BELANJA PERJALANAN	92.046,000	71.654,100	(20.391,900)
	BELANJA LAIN-LAIN	1.896.851,000	1.654.096,890	(242.754,010)
	ANGSURAN HUTANG	115.000,000	103.800,000	(11.200,000)
	PENSIUN DAN ONDERSTAND	3.500,000	550,000	(2.950,000)
	GANJARAN SUBSIDI/SUMBANGAN	105.697,000	105.184,700	(512,300)
	PENGELUARAN TAK TERMASUK BAG LAIN	399.387,000	395.346,000	(4.041,000)
	PENGELUARAN TAK TERSANGKA	976.915,000	175.590,900	(801.324,100)
		<b>25,841,473,000</b>	<b>23,402,980,543</b>	<b>(2,438,492,457)</b>

RINGKASAN PERHITUNGAN ANGGARAN BELANJA HUTIN  
TAHUN ANGGARAN 1999/2000

KODE ANGGARAN	URAIAN BAGIAN DAN POS	ANGGARAN SETELAH PERUB	JUMLAH REALISASI	BERLEBIH/BERKURANG
	2	3	4	5
2.2.	BELANJA BAGIAN URUSAN UMUM DAN PEMERINTAHAN	8,335,809,000	7,710,769,469	(525,040,531)
2.3.	BAGIAN DINAS PEKERJAAN UMUM,DKP DAN TATA KOTA	1,880,475,000	1,772,471,929	(108,003,071)
2.5.	BAGIAN DINAS KES.UMUM DAN PUSKESMAS	3,516,915,000	3,362,675,083	(154,239,917)
2.6.	BAGIAN DINAS P & K	9,372,774,000	8,740,000,855	(632,173,145)
2.8.	BAGIAN DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	442,989,000	411,271,976	(31,717,024)
2.10.	BAGIAN DINAS PENGELOLA PASAR	691,012,000	624,720,631	(66,291,369)
2.11.	BAGIAN ANGSURAN HUTANG DAN BUNGA PINJAMAN	115,000,000	103,800,000	(11,200,000)
2.12.	BAGIAN PENSJUN/ONDERSTAND	3,500,000	550,000	(2,950,000)
2.13.	GANJARAN/SUBSIDI DAN SUMBANGAN	105,697,000	105,184,700	(512,300)
2.14.	BAGIAN PENGELUARAN YANG TIDAK TERMASUK BAGIAN LAIN	399,387,000	395,346,000	(4,041,000)
2.15.	BAGIAN PENGELUARAN TAK TERSANGKA	976,915,000	175,590,900	(801,324,100)
	JUMLAH : I	25,841,473,000	23,402,980,543	(2,438,492,457)

RINGKASAN PERHITUNGAN ANGGARAN BELANJA PEMBANGUNAN SUB SEKTOR  
TALUN ANGGARAN 1999/2000

KODE ANGGARAN	URAIAN SEKTOR/SUB SEKTOR	ANGGARAN SETELAH PERUB	JUMLAH REALISASI	BERLEBIH/BERKURANG
1	2	3	4	5
2P.0.1.	SEKTOR INDUSTRI	33,000,000	32,960,000	(40,000)
2P.0.1.1.	Sub Sektor Industri	33,000,000	32,960,000	(40,000)
2P.0.2.	SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN	250,810,000	250,311,000	(499,000)
2P.0.2.1.	Sub Sektor Pertanian Rakyat	153,310,000	152,825,000	(485,000)
2P.0.2.3.	Sub Sektor Perikanan	67,000,000	66,224,000	(776,000)
2P.0.2.4.	Sub Sektor Perikanan	30,500,000	30,500,000	0
2P.0.4	SEKTOR TENAGA KERJA	0	0	0
2P.0.5	SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMB. USAHA DAERAH, KEUANGAN DAERAH	258,396,000	239,482,600	(18,913,400)
2P.0.5.1.	Sub Sektor Perdagangan *	20,000,000	19,270,500	(729,500)
2P.0.5.2.	Sub Sektor Pengembangan Usaha Daerah	35,000,000	35,000,000	0
2P.0.5.3.	Sub Sektor Keuangan Daerah	128,396,000	110,334,600	(18,061,400)
2P.0.5.4.	Sub Sektor Koperasi dan Penguaha kecil	75,000,000	74,927,500	(72,500)
2P.0.6.	SEKTOR TRANSPORTASI	2,101,267,000	1,843,849,216	(257,417,784)
2P.0.6.1.	Sub Sektor Prasarana Jalan *	1,022,767,000	956,977,850	(65,789,150)
2P.0.6.2.	Sub Sektor Transportasi Darat	1,078,500,000	886,911,366	(191,588,634)
2P.0.7.	SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI	105,000,000	102,843,175	(2,156,825)
2P.0.7.2.	Sub Sektor Energi	105,000,000	102,843,175	(2,156,825)
2P.0.8.	SEK.PARIWISATA & TELEKOMUNIKASI DAERAH	102,275,000	102,242,310	(32,690)
2P.0.8.1.	Sub Sektor Pariwisata	102,275,000	102,242,310	(32,690)
2P.0.9.	SEKTOR PEMB. DAERAH DAN PEMUKIMAN	552,317,000	488,316,345	(64,000,655)
2P.0.9.1.	Sub Sektor Pembangunan Daerah Bawah	189,250,000	188,440,000	(810,000)
2P.0.9.2.	Sub Sektor Pembangunan Kota	182,500,000	162,660,300	(19,839,700)
2P.0.9.3.	Sub Sektor Pembangunan Desa	180,567,000	137,193,045	(43,373,955)

KODE ANGGARAN	URAIAN SEKTOR/SUB-SEKTOR	ANGGARAN SETELAH PERUB	JUMLAH REALISASI	BERLEBIH/ BERKURANG
2P.0.10	SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG	186,337,000	175,704,715	(10,632,285)
2P.0.10.1	Sub Sektor Lingkungan Hidup	171,337,000	160,704,715	(10,632,285)
2P.0.11	SEKTOR PEND. KEB. NAS. KEPERCAYAAN	15,000,000	15,000,000	0
2P.0.11.1	Sub Sektor Tata Ruang	148,544,000	148,284,820	(263,180)
2P.0.11.2	THD. TUHAN YME. PEMUDA DAN OLAH RAGA	52,548,000	52,359,820	(188,180)
2P.0.11.3	Sub Sektor Pendidikan Luar Sekolah dan Keindahan	15,000,000	15,000,000	0
2P.0.11.4	Sub Sektor Keh. Daerah & Kepercayaan thd. Tuhan YME	13,000,000	13,000,000	0
2P.0.12	SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KB	68,000,000	67,925,000	(75,000)
2P.0.12.1	Sub Sektor Kependudukan dan KB	22,050,000	22,050,000	0
2P.0.13	SEKTOR KESELATAN/KESEJAJTERAAN	22,050,000	22,050,000	0
2P.0.13.1	SOSIAL PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA	49,591,000	48,047,750	(1,543,250)
2P.0.13.1.1	Sub Sektor Kesehatan	33,091,000	33,047,750	(43,250)
2P.0.13.2	Sub Sektor Kesehatan Sosial	3,500,000	2,000,000	(1,500,000)
2P.0.13.3	Sub Sektor Peranan Wanita, Anak dan Remaja	13,000,000	13,000,000	0
2P.0.14	SEKTOR PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN	38,000,000	33,591,450	(4,408,550)
2P.0.14.1	Sub Sektor Perumahan dan Pemukiman	30,000,000	25,741,450	(4,258,550)
2P.0.14.2	Sub Sektor Penataan Bangunan	8,000,000	7,850,000	(150,000)
2P.0.15	SEKTOR AGAMA	60,000,000	60,000,000	0
2P.0.15.1	Sub Sektor Pelayanan Kebidanan Beragama	60,000,000	60,000,000	0
2P.0.16	SEKTOR ILMU, MANEJEMEN, DAN TEKNOLOGI	140,000,000	124,650,000	(15,350,000)
2P.0.16.5	Sub Sektor Sistem Informasi dan Statistik	140,000,000	124,650,000	(15,350,000)
2P.0.17	SEKTOR HUKUM	80,500,000	67,006,200	(13,493,800)
2P.0.17.1	Sub Sektor Hukum	80,500,000	67,006,200	(13,493,800)
2P.0.18	SEKTOR APARATUR PEMERTI DAN PENGAHASAN	1,513,415,000	1,449,579,200	(63,835,800)
2P.0.18.1	Sub Sektor Aparatur Pemerintah	1,300,350,000	1,239,622,900	(60,727,100)
2P.0.18.2	Sub Sektor Penyelenggaraan dan Praktek Pemerintahan	213,065,000	209,956,300	(3,108,700)
2P.0.19	SEKTOR PENKOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA	183,644,000	175,924,350	(7,719,650)
2P.0.19.1	Sub Sektor Politik	134,744,000	126,935,150	(7,808,850)
2P.0.19.2	Sub Sektor Penerangan, Komunikasi & Media Massa	49,000,000	48,989,200	(10,800)
2P.0.20	SEKTOR KEAMANAN & KETERTIDAN UMUM	210,000,000	209,685,000	(315,000)
2P.0.20.1	SEKTOR Keamanan dan Keb. Umum	209,685,000	209,685,000	0
	Jumlah Belanja Proyek	6,035,150,000	5,574,528,331	(460,621,669)
	Jumlah Belanja Rutin + Proyek	31,876,623,000	25,977,508,874	(5,899,114,126)

\*) Selisih Anggaran sebesar Rp. 113.714.000,- sudah dianggarkan ttp. tidak dijumlahkan dalam APBD DADPK Tgl. 13 Januari 2000

URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN

PENDAPATAN

AYAT	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUB	JUMLAH YANG DITERIMA	LEBI/KURANG DARI ANGGARAN	DASAR HUKUM
1	2	3	4	5	6
1.5	BAGIAN URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN	2,844,592,000	3,120,386,106	275,794,106	
1.5.1.	POS URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN	2,844,592,000	3,120,386,106	275,794,106	
001	Iuran Wajib Pegawai	802,356,000	817,659,953	15,303,953	
002	Potongan beras	1,522,990,000	1,505,972,120	(17,017,880)	SK Menkue RI No.288/013/1992 lg.1.6-3-1992
003	Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21	384,630,000	659,472,033	274,842,033	
004	Penerimaan amal Bhakti KORPRI	0	0	0	
005	Potongan Tabungan Uang Muka Perumahan pegawai	134,616,000	137,282,000	2,666,000	

## URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN

## BELANJA

BAGI/POS PASAL	URAIAN BAG/POS/PASAL	ANGGARAN SETELAH PERUB	TELAH DIRÉALISIR		PENJELASAN
			JUMLAH	BERLEBIH/BERKURVA	
1	2	3	4	5	6
2.16	BAGIAN URUSAN DAN PERHITUNGAN	2,844,592,000	3,120,386,106	275,794,106	
2.16.1.	POS URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN	2,844,592,000	3,120,386,106	275,794,106	
2.16.2.1152	Iuran Wajib Pegawai	802,356,000	817,659,953	15,303,953	
1157	Potongan Beras Pegawai	1,522,990,000	1,505,972,120	(17,017,880)	
1158	Potongan tunjangan Uang Muka Penumahan Pegawai	134,616,000	137,282,000	2,666,000	
1161	Potongan Pajak Penghasilan	384,630,000	659,472,033	274,842,033	
1162	Pembayaran Amal Bhakti KORPRI	0	0	0	